

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan kegiatannya selalu melakukan interaksi dengan publiknya dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan publiknya. Publik yang dimaksud adalah publik internal maupun publik eksternal. Hubungan yang dijalin ini untuk membentuk *goodwill*, mencapai pengertian yang baik dan mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat.

Perusahaan membutuhkan suatu fungsi atau badan yang dapat menjalankan komunikasi yang efektif untuk menjalin hubungan yang baik dengan publiknya. Fungsi yang memenuhi tinjauan diatas adalah *public relations* yang berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan baik antara komponen dalam suatu lembaga untuk memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan opini publik yang menguntungkan dalam mencapai kerjasama yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut praktisi *public relations* harus mampu membangun komunikasi yang baik, antara pimpinan karyawan/ antarkaryawan perusahaan atau disebut dengan kegiatan *employee relations*.

Melalui kegiatan *employee relations* yang merupakan kekuatan mengelola sumber daya manusia yang baik dan handal, akan sangat berpengaruh terhadap program-program yang akan dijalankan dalam mencapai visi misi dan tujuan perusahaan atau organisasi. Kegiatan *employee relations* dalam sebuah perusahaan atau organisasi diharapkan dapat menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pihak pimpinan

perusahaan atau organisasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan seperti bekerja dengan penuh semangat, memiliki loyalitas, berdisiplin tinggi, serta mampu mencapai standar kerja yang efisien dan efektif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap program-program yang akan dijalankan dalam mencapai visi misi dan tujuan perusahaan atau organisasi.

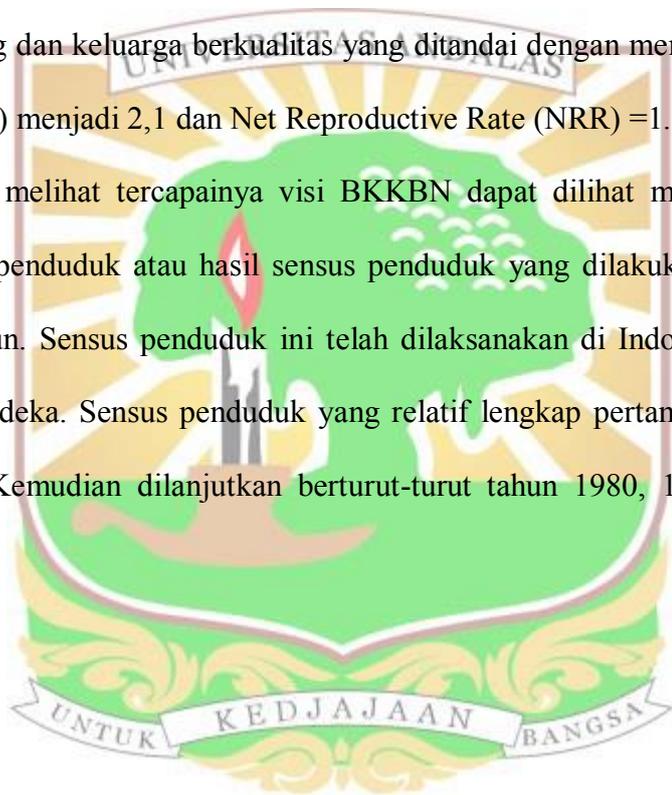
Salah satu perusahaan yang menganggap bahwa sumber daya manusia sebagai aset penting dalam perusahaan perlu diperhatikan agar tercapai visi misi dan tujuan perusahaannya adalah instansi pemerintah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang terdapat dalam Kertas Kerja Perseorangan (KPP) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat (2010:3) bahwa perlu ditingkatkan kompetensi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, guna menunjang suatu proses perencanaan yang baik tentu harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal disamping faktor pendukung lainnya. Kemudian dalam Kertas Kerja Perseorangan (KPP) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat juga terdapat visi misi dengan 5 grand strategi, salah satunya yaitu memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia) operasional program KB (2010:9-10).

Peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kegiatan *employee relations* sehingga visi misi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai instansi pemerintah, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oleh sebab itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat harus mampu mencapai visi misi BKKBN.

Visi BKKBN pada tahun 2015 mengalami perubahan. Perubahan visi dan misi dipandang perlu oleh BKKBN Pusat karena ada satu tujuan yang diinginkan yakni “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1.

Untuk melihat tercapainya visi BKKBN dapat dilihat melalui data laju pertumbuhan penduduk atau hasil sensus penduduk yang dilakukan dalam jarak waktu 10 tahun. Sensus penduduk ini telah dilaksanakan di Indonesia semenjak Indonesia merdeka. Sensus penduduk yang relatif lengkap pertama dilaksanakan tahun 1971. Kemudian dilanjutkan berturut-turut tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010.



Tabel 1.1 Data Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi					
Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun				
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2014 ²
Aceh	2,93	2,72	1,46	2,36 ¹	2,06
Sumatera Utara	2,60	2,06	1,32	1,10	1,39
Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63	1,34	1,34
Riau	3,11	4,30	4,35	3,58	2,64
Jambi	4,07	3,40	1,84	2,56	1,85
Sumatera Selatan	3,32	3,15	2,39	1,85	1,50
Bengkulu	4,39	4,38	2,97	1,67	1,74
Lampung	5,77	2,67	1,17	1,24	1,26
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0,97	3,14	2,23
Kepulauan Riau	-	-	-	4,95	3,16
DKI Jakarta	3,93	2,42	0,17	1,41	1,11
Jawa Barat	2,66	2,57	2,03	1,90	1,58
Jawa Tengah	1,64	1,18	0,94	0,37	0,82
DI Yogyakarta	1,10	0,57	0,72	1,04	1,20
Jawa Timur	1,49	1,08	0,70	0,76	0,69
Banten	-	-	3,21	2,78	2,30
Bali	1,69	1,18	1,31	2,15	1,24
Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82	1,17	1,40
Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64	2,07	1,71
Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29	0,91	1,68
Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99	1,79	2,38
Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45	1,99	1,87
Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81	3,81	2,64 ³
Sulawesi Utara	2,31	1,60	1,33	1,28	1,17
Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57	1,95	1,71
Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49	1,17	1,13
Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15	2,08	2,20
Gorontalo	-	-	1,59	2,26	1,65
Sulawesi Barat	-	-	-	2,68	1,95
Maluku	2,88	2,79	0,08	2,80	1,82
Maluku Utara	-	-	0,48	2,47	2,21
Papua Barat	-	-	-	3,71	2,65
Papua	2,67	3,46	3,22	5,39	1,99
INDONESIA	2,31	1,98	1,49	1,49	1,40
Catatan: Tidak Termasuk Timor Timur ¹ Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000–2010 untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010 ² Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni) ³ Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010–2014 untuk Kalimantan Timur merupakan gabungan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara					

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 laju pertumbuhan penduduk diatas, Provinsi Sumatera Barat antara hasil SP-2000 dengan SP-2010 adalah sebesar 1,34 persen rata-rata per tahun. Fenomena hasil sensus tersebut, menurut Prof.Elfindri, SE,MA selaku dosen Universitas Andalas dalam *Rekaman Peristiwa Program Kependudukan dan KB Provinsi Sumatera Barat*, Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi No: 06/ADPIN/2011 menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk 1,34 memang relative rendah. Ia juga menegaskan bahwa rendahnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Sumatera Barat sangat tidak sebanding jika dilihat dengan yang terjadi pada kota-kota seperti Jambi dan Pekanbaru. Berdasarkan pernyataan Prof.Elfindri, SE,MA tersebut membuktikan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat masih belum bisa mewujudkan visi BKKBN “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”.

Selain itu, BKKBN Provinsi Sumbar juga mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan program BKKBN. Seperti yang dikatakan Gubernur pada suatu acara yang dihadiri oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Herman Susanto, Ketua Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Nofrijal, dan Ketua Perwakilan BKKBN Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Kamis (9/4) di Auditorium Gubernur, Padang bahwa salah satu kendala yang ditemui dalam mensosialisasikan program-program BKKBN di Sumatera Barat (Sumbar), yaitu sosialisasi ke beberapa daerah terpencil (<http://www.pks.or.id>, diakses pada 16 November 2015).

Berdasarkan pra survey di bulan Oktober 2015 yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja mencapai visi misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat telah

melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dan membuat Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pengelola Perencanaan Advokasi dan KIE pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa kegiatan *employee relations* sudah diterapkan dan dijalankan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat seperti adanya media komunikasi internal yaitu kabakabe, komunikasi langsung antara atasan dengan bawahan, kunjungan oleh pihak manajemen ketika ada karyawan yang mendapat musibah, mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, hiburan darmawisata, olahraga, *study tour* dan pelatihan, hadiah-hadiah dan penghargaan. Selain itu Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat juga menerapkan bentuk kegiatan penempatan dan pemindahan pegawai, penerimaan pegawai baru, pensiun dan jaminan sosial.

Semua kegiatan *employee relations* diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi perusahaan. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah kepuasan dari para pegawai yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja pegawai bagi perusahaan atau instansi dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatan dan program-program perusahaan atau instansi, sehingga mampu mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkannya.

Namun dalam menjalankan kegiatan *employee relations* pada penempatan dan pemindahan kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat menimbulkan situasi kerja yang tidak kondusif. Hal ini didukung oleh pernyataan berdasarkan wawancara bulan Oktober 2015 dengan salah satu staf pegawai yang mengatakan bahwa pada saat pertama kali penempatan dan pemindahan kerja,

pegawai yang dipindahkan kerja mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan situasi kerja yang tidak kondusif.

Situasi kerja yang tidak kondusif dapat menghambat produktivitas kerja pegawai dalam menjalankan kegiatan serta program-program perusahaan sehingga menghambat tercapainya visi misi serta tujuan dari perusahaan. Produktivitas kerja pegawai dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan kerja. Kegiatan *employee relations* dalam bentuk penempatan dan pemindahan kerja dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Pegawai yang ditempatkan atau dipindahkan dari satu bidang pada bidang lainnya akan membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan barunya karena masing-masing bidang dari sebuah perusahaan ataupun instansi mempunyai tugas yang berbeda. Setiap pegawai harus mampu memahami dan menjalankan tugas sesuai program yang telah ditetapkan perusahaan.

Demikian juga halnya dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, kegiatan *employee relations* dalam bentuk penempatan dan pemindahan kerja, jika pegawai mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya maka dapat mengurangi produktivitas kerja pegawai sehingga menghambat tercapainya visi misi dan tujuan perusahaan atau instansi. Dalam hal ini, peran praktisi Humas (*Public Relations*) sangat penting, salah satunya dengan melakukan audit komunikasi untuk meningkatkan efektivitas sistem komunikasi instansi pemerintah terutama pada kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun

2011 Tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelembagaan Hubungan Masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan layanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus dan keterbukaan informasi dari dan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antarpejabat di lingkungan instansi pemerintah.
- b. bahwa untuk mewujudkan huruf a tersebut, diperlukan audit komunikasi di lingkungan instansi pemerintah pada situasi tertentu untuk meningkatkan efektivitas system komunikasi instansi pemerintah.

Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat belum pernah melakukan audit komunikasi kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan audit komunikasi kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat sebagai penilaian terakhir terhadap efektivitas kegiatan penempatan dan pemindahan kerja yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dengan judul penelitian “**AUDIT KOMUNIKASI KEGIATAN PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN KERJA PEGAWAI DALAM KEGIATAN *EMPLOYEE***

RELATIONS PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah bagaimana audit komunikasi kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

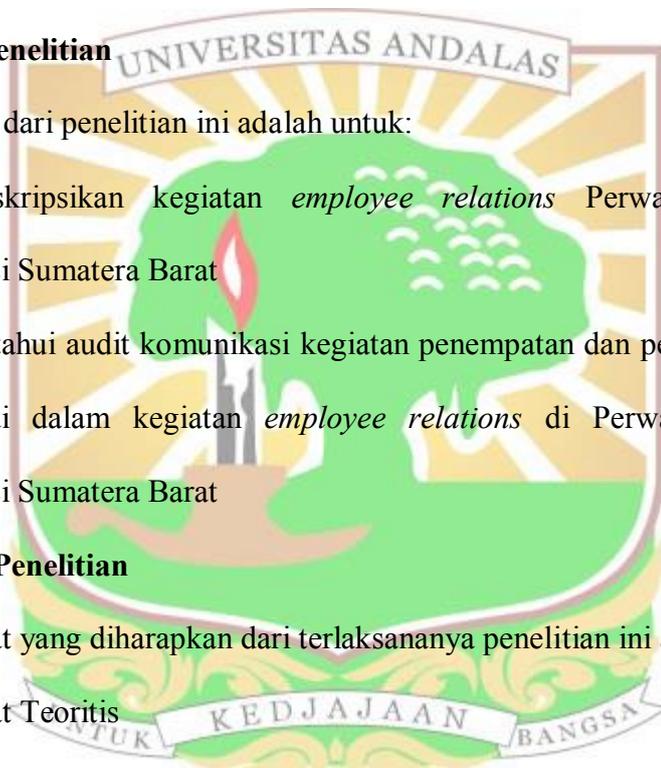
1. Mendeskripsikan kegiatan *employee relations* Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
2. Mengetahui audit komunikasi kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas khususnya jurusan Ilmu Komunikasi mengenai keahlian *public relations* pada kegiatan *employee relations* dan audit komunikasi serta dapat dijadikan sebagai bahan pada penelitian selanjutnya.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat untuk membantu instansi BKKBN dan instansi sejenis di wilayah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya dapat diketahui bagaimana audit komunikasi kegiatan penempatan dan pemindahan kerja pegawai dalam kegiatan *employee relations* Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

